

PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jonar Pranata Sungke¹, Hamzari², Sudirman Dg. Massiri³

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu Sulawesi Tengah 94111

¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi : jonar.sungke@gmail.com

²Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

Urban development planning is to improve the quality and environmental sustainability in the city of Urban Sigi Biromaru Sigi Regency Central Sulawesi Province. This study aims to determine the planning of urban development in Sigi District. The method used in this research is descriptive analysis method by describing and mengintreprestasikan existing condition or relationship. Research on urban development planning in Sigi Regency with Minister of Forestry regulation No.71 / Menhut-II / 2009 on city forest management, technical aspects, economic aspects, ecological, social and cultural aspects. Technical aspects of urban forest of Regency of Sigi has wide of area of 5 Ha with kind of plant of headland, ebony, nyatoh, mahoni with spacing of 3x5 M. Ecological, social and cultural aspect is knowledge and knowledge of society in development which studied memiliki category "Baik" from the perception of the community most states strongly agree and in accordance with the value of 4.87% in urban development planning in Sigi District. While the economic aspect in the planning of urban forest development in Sigi Biromaru Subdistrict Sigi Regency is using government (APBN). Adapted in a social environment with the right indicators and indicators for development in cities in Sigi Regency, with conditions not yet optimal with the final score of 1.4. The state of urban forest of Sigi Regency that has not been optimal since it is still not optimal.

Kata Kunci: Perencanaan, Hutan Kota.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk diperkotaan meningkatkan kebutuhan terhadap ruang guna kepentingan pemukiman, perkantoran, dan sentra ekonomi. Di sisi lain peningkatan harga lahan diperkotaan mendorong penggunaan lahan cenderung berdasarkan nilai ekonomi, dampaknya ruang terbuka hijau menjadi berkurang dan iklim mikro diperkotaan menjadi panas. Dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengembangkan beberapa kegiatan salah satunya melalui pembangunan hutan kota. (Peraturan Menteri Nomor P.71/Menhut-II/2009).

Perencanaan merupakan proses aktif yang memerlukan pemikiran yang serius mengenai apa yang dapat atau sebaliknya ada dan terjadi di masa yang akan datang. Proses perencanaan hutan harus dirancang dan

dilakukan untuk menjamin keseimbangan antara kenyataan di lapangan dengan kapasitas manajemen, dan antara prioritas ekonomi, ekologi, dan sosial serta prioritas – prioritas pembangunan kehutanan regional dan nasional. (Kartodihardjo, dkk, 2011).

Sebagaimana dimaksud rencana pembangunan hutan kota dalam Peraturan menteri kehutanan nomor 71/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan hutan kota adalah berdasarkan kajian dari aspek teknis, aspek ekologis, aspek ekonomis, dan aspek sosial dan budaya. (Peraturan menteri kehutanan nomor 71/Menhut-II/2009).

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pemerintah. Hutan kota merupakan kumpulan vegetasi yang mempunyai peran penting dalam siklus biogeokimia pada suatu ekosistem. Vegetasi penyusun hutan kota merupakan komponen ekosistem yang baru

dilintasi oleh siklus unsure kimia dan berfungsi sebagai penggerak aktivitas seluruh komponen ekosistem, serta mempunyai kemampuan fisiologis dan ekologis dalam memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, hutan kota juga memberikan manfaat lain yang luas kaitannya dengan estetika, proteksi dan manfaat khusus lainnya. (Forman, R.dkk.2012).

Penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan tambahan dan rekomendasi bagi pemerintah setempat untuk melengkapi masterplan Ruang Hutan Kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai data dan informasi yang terdapat dalam karya ilmiah ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan lokasi hutan kota dan tipe hutan kota yang ingin dibangun. Dengan terciptanya perencanaan hutan kota yang baik, diharapkan dapat terlaksana pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan semua kriteria pengelolaannya.

Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota

Tujuan dan Kegunaan

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan hutan kota yang berada di Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua (2) bulan pada bulan April – Juni 2017, bertempat di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian mencakup lokasi

Hutan Kota yang berada pada Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Alat dan Bahan

Objek yang menjadi bahan penelitian ini yaitu lokasi hutan kota, sarana dan prasarana, serta instrumen Kuisisioner sebagai analisis, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Alat yang digunakan yaitu alat tulis menulis, kamera, dan Global Positioning System (GPS).

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara mendalam pada informan dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis data primer terdiri atas tahapan bentuk perencanaan pembangunan hutan kota dalam realisasi pembangunan hutan kota berdasarkan peraturan menteri nomor 71/Menhut-II/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Jenis data sekunder terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen pendukung pembangunan hutan kota.

Analisis Data

Data hasil penelitian ini akan dianalisis melalui dua tahap yaitu, tahap analisis deskriptif terhadap perencanaan pembangunan hutan kota berdasarkan sesuai dengan peraturan menteri nomor 71/menhut-II/2009, serta penilaian kriteria dan indikator terkait penerapan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah .

Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bias berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian

yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Sukmadinata, 2006 dalam A'yun 2013)

Tahap penilaian Kriteria dan Indikator pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis penelitian kriteria dan indikator terkait penerapan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Proses penelitiannya diadaptasi dari rumus penelitian yang menggunakan perangkat Kriteria dan indikator (K&I) CIFOR. Berikut rumusnya:

“Pembangunan hutankota = [P1 (skor) x B1] + [P2 (skor) x B2] “

Perangkat kriteria dan indikator(K&I) Cifor merupakan suatu get generik yang berisi prinsip. Kriteria merupakan penjelasan dari prinsip dan membuat prinsip lebih mudah diterjemahkan atau dipraktekkan. Kriteria berasal dari keadaan atau gejala- gejala yang biasa dilihat kemudian diangkat menjadi sebuah pemahaman atau pengertian yang lebih umum.Kriteria menjadi sesuatu yang secara langsung dapat digunakan untuk mengukur suatu kegiatan atau keadaan.Sedangkan indikator adalah penjelasan dari kriteria secara lebih rinci dan dapat diukur secara langsung.Indikator selalu terkait dengan hal – hal yang biasa dirasa, diraba, dilihat, dibayangkan keberadaannya dan dialami oleh masyarakat. Indikator juga bias dikatakan sebagai “tanda” atau “gejala” atau ciri – cirri dari sebuah kejadian (Awang, dkk.2008).

Metode penilaian kriteria dan indikator (K&I) ini untuk menganalisis keberhasilan penerapan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan kriteria dan indikator terkait penerapan hutan kota (Munggoro et, al 2001 dalam A'yun).

Adapun proses pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru selanjutnya masing – masing prinsip berserta kriteria dan indikator dilakukan penilaian dengan keterangan belum optimal, kurang optimal, dan sangat optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Biofisik penetapan Hutan Kota Kabupaten Sigi.

Letak dan Luas Hutan Kota

Berdasarkan keputusan Bupati Sigi Nomor 661 – 344 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi hutan kota kabupaten sigi, menetapkan lokasi hutan kabupaten sigi yang terletak di kawasan perkantoran Bora Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.. Lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembuatan pembangunan hutan kota ini sekitar lima (5) Ha dalam satu hamparan yang terbagi dalam jalur, yaitu terdapat di kawasan perkantoran Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana lokasi ini merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Letak geografis dan Topografi Hutan Kota

Secara letak geografis terletak pada batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palolo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maranatha dan Kecamatan Dolo, sebelah timur berbatasan dengan desa Sidondo 1 dan sidondo 4, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Souluwe dan Desa Watunonju. Adapun pada pengunan lahan yang terdapat pada Desa Bora tempat dimana lokasi hutan kota berada yaitu ladang 119 Ha, Kebun 146 Ha, perumahan 30 Ha dan Hutan 2.194 Ha.Secara hidrologis terletak pada daerah aliran sungai wuno. (BPDASHL Palu Poso).

Pada umumnya vegetasi yang terdapat pada areal pembuatan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari semak – semak dan lamtoro. Sedangkan topografi lokasi hutan kota memiliki tipe iklim yang di ukur dari kelembaban udara 30% dengan suhu udara 25-31°C dan curah hujan 76,16 mm. Serta ketinggian tempat lokasi hutan kota setinggi 16 mdpl dengan topografi landai-berbukit. Adapun aksesibilitas jarak provinsi ke lokasi hutan kota 20 Km, jarak kabupaten ke lokasi hutan kota 0 Km dan jarak kecamatan ke lokasi hutan kota 1 Km (BPDASHL Palu Poso

Bentuk, Tipe dan Fungsi Hutan kota Kabupaten Sigi.

Adapun fungsi, manfaat, bentuk dan tipe hutan kota yang berada di Kecamatan Sigi

Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan pengamatan langsung di lokasi penelitian adalah merupakan kondisi lahan terbuka yang memiliki fungsi perlindungan (Iklim Mikro dan Suhu) dan fungsi estetika (menutupi bagian kota yang tidak produktif / kurang baik). Hutan kota Kabupaten Sigi terletak di area perkantoran atau pusat pendidikan memiliki fungsi estetika. Sedangkan bentuk dan tipe hutan kota yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lahan terbuka berbentuk jalur lurus dan melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai dan lainnya, lebar lahan atau panjangnya tidak dibatasi. Dan Tipe hutan kota di Kabupaten Sigi merupakan tipe pengamanan (Terletak ditepi jalan) dan Tipe kawasan pemukiman (terdapat bangunan dan dekat aktivitas masyarakat). penentuan tipe dan bentuk hutan kota disusun dengan mempertimbangkan kondisi biofisik kawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, kepentingan serta kebutuhan pengembangan wilayah secara umum pada masa yang akan datang (Hermawan dkk. 2008).

Perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Perencanaan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah adalah perencanaan yang berdasarkan sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor 71/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan hutan kota, meliputi aspek teknis, aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial dan budaya

Aspek Teknis.

Aspek teknis dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah adalah terdiri dari kesiapan lahan dan jenis tanaman, teknologi/pelaksanaan hutan kota.

Kesiapan lahan.

Hasil inventarisasi tegakan yang ditemukan potensi tegakan awal lokasi penanaman sebesar 30 batang/hektar, terdiri dari tingkat sema (tinggi < 1,5 meter) 10 batang/hektar. Pancang (tinggi > 1,5 meter

dengan diameter s/d 10 cm) 20 batang/hektar. Dengan demikian, dari hasil inventarisasi awal tegakan maka jenis kegiatan ini adalah pengkayaan dengan jumlah bibit yang ditanam pada tahun pertama (P0) sebanyak 667 batang.

Jenis Tanaman dan Pelaksanaan

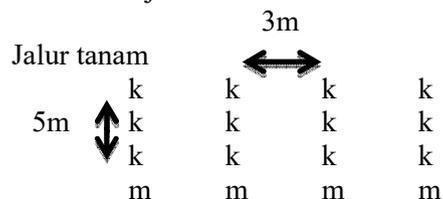
Pemilihan suatu tanaman atau jenis pohon dilakukan berdasarkan penyesuaian tanaman kehutanan yang memiliki kualitas yang baik. Adapun jenis pohon dan jarak tanam pohon yang akan dibibitkan terdiri dari jenis kayu. dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1. Jenis pohon dan jarak tanam pohon, terdiri dari jenis kayu

No	Jenis bibit/tanaman	Luas areal	Jarak tanam	Jumlah bibit (batang /Ha)
1	Tanjung	5 Ha	3 x 5	207
2	Eboni		3 x 5	50
3	Nyatoh		3 x 5	200
4	Mahoni		3 x 5	210

Sumber: Data Produksi bibit perencanaan pembangunan hutan kota 2017.

Bentuk penanaman hutan kota disesuaikan dengan kondisi lahan, dimana lokasi memiliki kelereng yang datar sampai landau berbentuk jalur.



Gambar 1 : Tata tanam sela tanaman

Keterangan : K: Tanaman Kayu

M: Tanaman Buah
Jarak tanam 3 x 5 M

Aspek ekologis, sosial dan budaya.

Aspek ekologis, sosial dan budaya dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kabupaten Sigi untuk mengetahui hubungan masyarakat dan lingkungan (hutan kota) melalui pandangan dan pengetahuan persepsi masyarakat. Dalam hal tersebut menjelaskan

bahwa manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat penting. Manusia dalam melakukan suatu tindakan biasanya di latar belakang oleh pemahaman terhadap tindakan yang akan dilakukan disebut sebagai persepsi. (Johansen 2014).

Persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan hutan kota yang di wakili 20 responden yang berada di sekitar hutan kota kawasan perkantoran Kabupaten Sigi.

Persepsi masyarakat Tentang perencanaan pembangunan Hutan Kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat sebanyak 20 responden, menjelaskan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya rencana pembangunan hutan kota yang berada dikawasan perkantoran kabupaten sigi. Dalam hal tersebut Masyarakat menjelaskan bahwa adanya suatu pembangunan hutan kota ini bisa mengontrol masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan dengan baik dalam menjaga kestabilan ekosistem hutan. Masyarakat sebagian besar sudah sangat mengetahui manfaat dari perencanaan pembangunan hutan kota, yaitu untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan sekitar dari pencamaran udara dan pemanasan global di era globalisasi ini. Kegiatan pemeliharaan hutan kota yang berada di kawasan perkantoran kabupaten sigi Pemerintah mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara masyarakat hutan kota.

Dapat di lihat pada nilai tingkat responden masyarakat pada Tabel 2. Nilai responden persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2. Nilai responden persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan hutan kota yang berada di Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

No	Presepsi masyarakat	Ss	S	Ts	Sts	Tm	Total
1	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai hutan kota.	40	44	-	-	1	85
2	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai fungsi dan tujuan Pembangunan hutan kota.	40	40	-	-	2	82
3	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai teknis pembangunan Hutan kota.	35	36	-	-	4	75
4	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai eksisting kawasan Hutan kota.	30	44	-	-	3	77
5	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai pemeliharaan hutan kota	45	45	-	-	2	92
6	Presepsi terhadap pemahaman Mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten terhadap hutan kota.	55	28	-	-	2	85
	Jumlah	245	237	-	-	14	496

Sumber : Data olahan responden pandangan persepsi masyarakat dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi 2017.

Ss = sangat setuju S = setuju TS = tidak setuju STS = sangat tidak setuju TM = tidak mengetahui.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum masyarakat berpandangan dalam berpresepsi tentang perencanaan pembangunan hutan kota. Hal ini terbukti dari presepsi masyarakat yang sebagian besar menyatakan sangat setuju dan setuju (4.87%), dan menyatakan tidak mengetahui (0,14%)

disebabkan kurangnya pemahaman dalam menggali informasi untuk mengetahui lingkungan hutan kota pada umumnya.

Keterangan :

90 – 100 = Sangat baik

80 – 90 = Baik

70 – 80 = Cukup baik

Aspek Ekonomis

Dalam Peraturan menteri nomor 71/menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan hutan kota menjelaskan adanya suatu aspek ekonomis sebagai salah satu bentuk perencanaan hutan kota. Berdasarkan hal tersebut aspek ekonomis adalah menjelaskan tentang biaya dan manfaat dalam perencanaan pembangunan hutan kota. Aspek ekonomis perencanaan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Rencana anggaran biaya kegiatan pemeliharaan Hutan Kota di kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi provinsi Sulawesi tengah adalah menggunakan biaya pemerintah (APBN). Dengan rincian dari pemeliharaan awal (T0) sebesar Rp.87.573.500, pemeliharaan tahun pertama (T1) dan untuk pemeliharaan tahun kedua (T2).

Penilaian kriteria dan indikator penerapan pembangunan hutan kota yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis penelitian kriteria dan indikator terkait penerapan pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Proses penelitiannya diadaptasi berdasarkan kesejahteraan sosial masyarakat di lapangan dengan program yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola BPDASHL Palu-Poso dengan rumus penelitian yang menggunakan perangkat kriteria dan indikator (K&I).

Kriteria menjadi sesuatu yang secara langsung dapat digunakan untuk mengukur suatu kegiatan atau keadaan. Sedangkan indikator adalah penjelasan dari kriteria secara lebih rinci dan dapat diukur secara langsung. Indikator selalu terkait dengan hal – hal yang biasa dirasa, diraba, dilihat,

dibayangkan keberadaannya dan dialami oleh masyarakat. (Munggoro et, al 2001 dalam A'yun 2013).

Penetapan areal kerja hutan kota

Penetapan areal kerja hutan kota merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pembangunan hutan kota adalah mengajukan permohonan izin penetapan kawasan, dimana yang menetapkan adalah menteri berdasarkan peraturan kementerian kehutanan nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan hutan kota yang mewajibkan setiap kota/kabupaten harus memiliki hutan kota. Penetapan hutan kota memiliki dua item kegiatan yang harus dilakukan yaitu, permohonan penetapan areal kerja hutan kota dan verifikasi areal kerja hutan kota. Dua item ini, yang akan menjadi syarat dalam penetapan areal kerja hutan kota dan masing – masing memiliki program yang harus dicapai serta merupakan faktor pendukung dalam penetapan areal kerja hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tahapan ini akan disusun dalam bentuk tabel berdasarkan prinsip, kriteria, dan indikator, kemudian dilakukan pemberian skor awal dengan melihat jumlah indikator yang tercapai sebagai berikut:

A. Prinsip: penetapan areal kerja hutan kota (50%).

Kriteria: 1. Permohonan penetapan areal kerja hutan kota (25%):

- a. Sketsa lokasi hutan kota.
- b. Organisasi lembaga
- c. Rencana kegiatan
- d. Peta Lokasi hutan kota
- e. Deskripsi lokasi.

2. Verifikasi areal kerja hutan kota (25%):

- a. verifikasi kesesuaian fungsi kawasan hutan kota.
- b. surat keputusan penetapan areal kerja hutan kota.
- c. verifikasi kepastian luas areal kerja hutan kota.

Keterangan di atas merupakan prinsip, kriteria, dan indikator pada tahapan penetapan areal kerja hutan kota Sigi, dengan nilai bobot pertama 50% dari 100% dan menjadi kriteria adalah permohonan penetapan areal kerja hutan kota dan verifikasi areal kerja hutan kota dengan nilai bobot masing – masing 25%.

Pemberian nilai bobot ini bukan angka pasti, tapi merupakan angka relatif yang bisa di tentukan oleh peneliti. Kemudian yang menjadi indikatornya dengan jumlah skor keseluruhan adalah delapan (8) program dari kedua kriteria tersebut tersebut.

Tahap fasilitasi dan pendampingan

fasilitasi dan pendampingan adalah tahapan kedua dalam kegiatan pembangunan hutan kota dan merupakan suatu upaya penyediaan kebutuhan hak peneglola hutan kota, serta yang melakukannya adalah pihak fasilitator dalam hal ini adalah pihak pengelola. Fasilitasi dan pendampingan dilakukan melalui empat (4) item kegiatan yaitu, pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, dan bimbingan teknis. Empat item masing – masing memiliki program yang harus dicapai. Selanjutnya tahapan ini akan disusun dalam bentuk tabel berdasarkan prinsip, kriteria, dan indikator kemudian akan di lakukan pemberian skor dengan melihat jumlah indikator yang di capai sebagai berikut:

- B. Prinsip: Fasilitasi dan pendampingan (50%). kriteria :
1. Pendidikan dan pelatihan (15%);
 - a. Meningkatkan kemampuan teknis anggota kelompok masyarakat dalam pembuatan hutan kota.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan anggota kelompok masyarakat.
 - c. Meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok masyarakat.
 2. Penguatan lembaga (10%).
Motivasi kepada lembaga masyarakat dalam membangun kerja sama dengan pemerintah.
 3. Penyuluhan dan pendampingan 15%
pendampingan kegiatan dilakukan kepada organisasi masyarakat dalam pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk hutan kota.
 4. Bimbingan teknis (10%)
Pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam pemeliharaan hutan kota.

Keterangan di atas merupakan prinsip, kriteria dan indikator pada tahap fasilitasi dan pendampingan. Dimana yang menjadi prinsip

adalah fasilitasi dan pendampingan itu tersendiri, dengan nilai bobot 50% dan yang menjadi kriteria adalah empat item kegiatan dalam fasilitasi dan pendampingan dengan nilai bobot yang di sebutkan di atas. program ini mengajarkan kelompok masyarakat untuk pemeliharaan hutan kota dari faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan.

Selanjutnya, empat kriteria dari tahap fasilitasi dan pendampingan ini akan dilakukan penilaian dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus penilaian yang dilakukan pada tahap penetapan areal kerja hutan kota, jadi hasil yang di dapatkan berdasarkan perhitungan sesuai rumus yang ada, hasil yang di dapatkan adalah 0,8 (nol koma delapan).

Berdasarkan hasil penilaian yang di lakukan pada kedua tahap (prinsip) diatas, maka kedua prinsip tersebut di lakukan penilaian untuk menentukan skor akhir. Skor akhir inilah yang menentukan optimal atau tidaknya pembangunan hutan kota yang di lakukan di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3. Nilai skor akhir pada pembagunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Prinsip	Skor	Skor akhir [P1 x B1] + [P2 x B2]
P1. Penetapan areal kerja hutan kota (50%)	2	1,4
P2. Fasilitasi dan pendampingan (50%)	0,8	
Jumlah		1,4 (belum optimal)

Sumber : Data olahan Nilai skor pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah 2017

Keterangan: Phk (Pembangunan hutan kota)

Tabel 3 diatas menunjukkan nilai skor akhir adalah 1,4 (satu koma empat). Maka hal ini masuk pada kategori skor 1-3 yang diartikan sebagai keadaan yang belum optimal berdasarkan pengamatan langsung di lapangan yang dimana pembangunan hutan kota di Kabupaten sigi merupakan tahap pembangunan yang baru diadakan sehingga

pencapaian yang didapatkan masih sangat belum optimal. Dengan demikian pembangunan hutan kota di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tergolong dalam kondisi pembangunan yang belum optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan analisis data, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek teknis perencanaan pembangunan hutan kota Kabupaten Sigi terdiri dari kesiapan lahan dan jenis tanaman/pelaksanaan. Kesiapan lahan dari hutan kota pada kabupaten Sigi memiliki luas areal 5 Ha dengan jenis tanaman tanjung, eboni, nyatoh, mahoni pada jarak tanaman 3x5 m.
2. Aspek ekologis, sosial dan budaya menjelaskan adanya suatu persepsi masyarakat untuk mengetahui pandangan dan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan hutan kota, hasil perolehan dalam skala persepsi masyarakat yang diteliti memiliki nilai kategori “ Baik “ hal ini terbukti dari persepsi masyarakat sebagian besar menyatakan sangat setuju dan setuju dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kabupaten Sigi dengan nilai 4,87%.
3. Aspek ekonomi dalam perencanaan pembangunan hutan kota di Kabupaten Sigi adalah menggunakan biaya pemerintah (APBN).
4. Diadaptasi kesejahteraan sosial dalam penilaian kriteria dan indikator dalam penerapan perencanaan pembangunan hutan kota di Kabupaten Sigi diartikan sebagai keadaan yang belum optimal dengan menunjukkan nilai skor akhir 1,4. Serta secara pengamatan langsung dilapangan keadaan hutan kota merupakan tahap pembangunan yang baru diadakan sehingga pencapaian yang didapatkan masih sangat belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, dkk.,2008. *Panduan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH)*.Harapan Prima Jakarta.
- A'yun., 2013. *Kajian pembangunan hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*. Universitas Tadulako, Palu.
- Balitbanghut. 2010. *Rencana Penelitian Integratif 2010-2014*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- Dahlan EN. 2004. *Membangun Hutan Kota Kebun (Garden City) Bernuansa Hutan Kota*. Bogor : IPB Press.
- Forman,R.dkk,2012 *Analisis Strategi pembangunan hutan kota*. Pekanbaru.
- Gagan.H.W.2012. *Perencanaan pembangunan hutan Kota di kota Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, IPB.
- Irwan ZD.2007. *Fungsi Taman Hutan Kota*. <http://researchengines.com/0707/zoeraini.html>. { 20 Januari 2017 }
- Hermawan, R, dkk. 2008.*Kajian Tipe dan bentuk hutan kota kawasan danau raja kota rengat kabupaten Indragiri hulu provinsi riau*. Media konservasi 13 (2): 71-78.
- Johansen, 2014. *Presepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan hutan kota di Kota Medan Sumatera Utara*. Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli..
- Kartodihardjio,H.dkk, 2011. *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) : Konsep, peraturan perundangan, dan Implementasi*. Direktorat wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota*.